EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2024 Per 11 Juli 2024

I. RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I) [18 RUU TERDIRI DARI 2 RUU USUL DPR; 6 RUU USUL PEMERINTAH; 2 RUU USUL DPD; 8 RUU KUMULATIF TERBUKA]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/ KOMISI VII	 RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi VII Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 19 Sept 2022 MP I 2022-2023 dibahas oleh Komisi VII Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 14 Juni 2022 Selesai Harmonisasi Surat Pengusul (Komisi VII) permintaan Harmonisasi (Surat No. LG/09047/DPR RI/VII/2021 tgl 5 Juli 2021)
2	Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika (Dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 3 Feb 2022 MP III 2021-2022 dibahas oleh Komisi III Surpres No. R-02/Pres/01/2022 tgl 14 Januari 2022
3	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 26 Agustus 2021 MP I 2021-2022 dibahas oleh Komisi III Surpres tgl 3 Agustus 2021 nomor R-35/Pres/08/2021
4	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 16 Juni 2020 MP IV 2019-2020 dibahas oleh Pansus Surpres Tgl 20 Mei 2020 Nomor : R-24/Pres/05/2020 (Mendagri, Menkeu, Bapennas, Menlu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menkumham)
5	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).	PEMERINTAH	 RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 23 Mei 2022 MP V 2021-2022 dibahas oleh Komisi I

	Per 11 Juli 2024		
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
6	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence)	PEMERINTAH	 RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 9 Nov 2022 MP II 2022-2023 dibahas oleh Komisi I Surat Presiden RI nomor: R-45/Pres/09/2022, tanggal 20 September 2022
7	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR/ANGGOTA	 RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi III Surpres Tgl 28 Nov 2022 Nomor: R-61/Pres/11/2022.
8	Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 14 Maret 2023 MP IV 2022-2023 dibahas oleh Pansus Surat Presiden Nomor: R-08/Pres/02/2023, tanggal 20 Februari 2023
9	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DPD	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 24 Agustus 2023 MP I 2023-2024 dibahas oleh Pansus Surat Presiden Nomor: R-35/Pres/07/2023, tanggal 7 Juli 2023. Surat DPD RI No: PU.00/458/DPD RI/III/2023, Tgl 6 Maret 2023
10	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique D'Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence)	PEMERINTAH	 RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 8 November 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Komisi I Surat Presiden Nomor: R-48/Pres/09/2023, tanggal 27 September 2023
11	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 8 November 2023 MP II 2023-2024

	JUDUL			
NO.	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN	
	antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence)		dibahas oleh Komisi I Surat Presiden Nomor: R-49/Pres/09/2023, tanggal 27 September 2023	
12	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence)	PEMERINTAH	 RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 8 November 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Komisi I Surat Presiden Nomor: R-50/Pres/09/2023, tanggal 27 September 2023 	
13	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja sama terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)	PEMERINTAH	 RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 8 November 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Komisi I Surat Presiden Nomor: R-51/Pres/09/2023, tanggal 27 September 2023 	
14	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 8 November 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Pansus Surat Presiden Nomor: R-	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Tahun 2006 tentang Paten		55/Pres/10/2023, tanggal 25 Oktober 2023
15	Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Badan Legislasi Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 4 Desember 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Badan Legislasi; Surat Presiden Nomor: R-60/Pres/11/2023, tanggal 10 November 2023
16	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional. Judul RUU dalam Surpres RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 27 Mei 2024 MP V 2023-2024 dibahas oleh Pansus; Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/04/2024. Tgl 3 April 2024
17	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Badan Anggaran Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 7 Juni 2024 MP V 2023-2024 dibahas oleh Badan Anggaran;
18	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/ KOMISI IX	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi IX Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 7 Juni 2024, MP V 2023-2024 dibahas oleh Komisi IX Surat Presiden Nomor: R-20/Pres/05/2024 tgl 29 Mei 2024. Disetujui menjad RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 28 Maret 2024 Selesai Harmonisasi di Badan Legislasi Tgl 13 November 2023

II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I [93 RUU TERDIRI DARI 5 RUU USUL DPR; 2 RUU USUL PEMERINTAH; DAN 86 RUU KUMULATIF TERBUKA]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang	DPR/	Surpres sudah disampaikan ke DPR RI • Disetujui menjad RUU usul DPR pada
	tentang Pelindungan Pekerja	BADAN	Paripurna Tgl 21 Maret 2023 • Selesai penyusunan Badan Legislasi Tgl 1
	Rumah Tangga	LEGISLASI	Juli 2020
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR RI
	Pancasila (BPIP)		
3.	Rancangan Undang-Undang	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR RI
J.	tentang Perampasan Aset Terkait		
	Tindak Pidana.		

	Per 11 Juli 2024			
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR/ BADAN LEGISLASI	 Menunggu Surpres Disetujui menjad RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 3 Oktober 2023 Selesai penyusunan Badan Legislasi Tgl 14 September 2023 	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR/ KOMISI VI	 Surat DPR belum dikirim ke Presiden Disetujui menjadi RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 3 Oktober 2023 Selesai Harmonisasi di Badan Legislasi tgl 13 September 2023 Surat Pengusul (Komisi VI) permintaan Harmonisasi (Surat No. B/16783/LG.01.01/12/2021 14 Desember 2021) 	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR (BADAN LEGISLASI)	 RUU Kumulatif Terbuka Menunggu Surpres Disetujui menjadi RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 21 November 2023 Selesai disusun Badan Legislasi Tgl 2 Oktober 2023 	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)	DPR (BADAN LEGISLASI)	RUU Kumulatif Terbuka • Menunggu Surpres • Disetujui menjad RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 21 November 2023 • Selesai disusun Badan Legislasi Tgl 25 Oktober 2023	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Ketiga atas nor 6 Tahun (BADAN I FOISI ASI) • Surpres sudah disampaikan ke DPR • Disetujui menjad RUU usul DPR Paripurna Tgl 28 Mei 2024 • Selesai disusun Badan Legislasi Tg		
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR (BADAN LEGISLASI)	RUU Kumulatif Terbuka • Surpres sudah disampaikan ke DPR RI • Disetujui menjad RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 28 Mei 2024 • Selesai disusun Badan Legislasi Tgl 16 Mei 2024	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	 RUU Kumulatif Terbuka Surpres sudah disampaikan ke DPR RI Disetujui menjad RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 28 Mei 2024 Selesai disusun Badan Legislasi Tgl 22 Mei 2024 	
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional	DPR (BADAN LEGISLASI)	RUU Kumulatif Terbuka • Surpres sudah disampaikan ke DPR RI • Disetujui menjad RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 28 Mei 2024 • Selesai disusun Badan Legislasi Tgl 22 Mei 2024	

	Per 11 Juli 2024		
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Indonesia		
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	KOMISI V	Menunggu Surpres Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 4 Juli 2024 Selesai proses Harmonisasi di Badan Legislasi pada tgl 20 Mei 2024 Surat Pengusul tanggal 3 April 2024, No: B/3776/LG.01/04/2024
13.	Asbupaten/Kota (Term III) di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan (RUU tentang Kabupaten Kadung, RUU tentang Kabupaten Bangli, RUU tentang Kabupaten Bangli, RUU tentang Kabupaten Gianyar, RUU tentang Kabupaten Jembrana, RUU tentang Kabupaten Karangsem, RUU tentang Kabupaten Karangsem, RUU tentang Kabupaten Klungkung, RUU tentang Kabupaten Fabanan, RUU tentang Kabupaten Bima, RUU tentang Kabupaten Dompu, RUU tentang Kabupaten Dompu, RUU tentang Kabupaten Lombok Barat, RUU tentang Kabupaten Lombok Tengah, RUU tentang Kabupaten Lombok Timur, RUU tentang Kabupaten Sumbawa, RUU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan, RUU tentang Kabupaten Bengkulu Utara, RUU tentang Kabupaten Bengkulu, RUU tentang Kabupaten Kota Bengkulu, RUU tentang Kabupaten Muara Enim, RUU tentang Kabupaten Muara Enim, RUU tentang Kabupaten Musi Banyuasin, RUU tentang Kabupaten Musi Rawas, RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir, RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir, RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir, RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu, RUU tentang Kota Palembang)	KOMISI II	RUU Kumulatif Terbuka • Menunggu Surpres • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna tgl 4 Juli 2024 • Selesai proses Harmonisasi di Badan Legislasi pada tgl 22 Mei 2024 • Surat Pengusul tanggal 14 September 2023
14.	27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota (<i>Term IV</i>) di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi D.I. Yogyakarta (RUU tentang Kabupaten Cianjur, RUU)	KOMISI II	 RUU Kumulatif Terbuka Menunggu Surpres Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna tgl 4 Juli 2024 Selesai proses Harmonisasi di Badan Legislasi pada tgl 22 Mei 2024 Surat Pengusul tanggal 17 Januari 2024 Proses Harmonisasi di Badan Legislasi
	tentang Kabupaten Clunjur, Koo tentang Kota Sukabumi, RUU tentang Kota Bogor, RUU tentang Kabupaten Bekasi, RUU tentang Kabupaten Bogor, RUU tentang Kabupaten Bogor, RUU tentang Kabupaten Bandung, RUU tentang Kota Bandung, RUU tentang Kabupaten Sumedang, RUU tentang Kabupaten Kuningan, RUU tentang Kabupaten		

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Cirebon, RUU tentang Kota Cirebon, RUU tentang Kabupaten Ciamis, RUU tentang Kabupaten Garut, RUU tentang Kabupaten Tasikmalaya, RUU tentang Kabupaten Indramayu, RUU tentang Kabupaten Majalengka, RUU tentang Kabupaten Karawang, RUU tentang Kabupaten Lebak, RUU tentang Kabupaten Pandeglang, RUU tentang Kabupaten Serang, RUU tentang Kabupaten Tangerang, RUU tentang Kabupaten Tangerang, RUU tentang Kabupaten Sleman, RUU tentang Kabupaten Sleman, RUU tentang Kabupaten Sleman, RUU tentang Kabupaten Bantul, RUU tentang Kabupaten Gunung Kidul)		
15.	27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota (<i>Term V</i>) di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat:	KOMISI II	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna tgl 9 Juli 2024 Selesai Harmonisasi di Badan Legislasi Tgl 27 Juni 2024 Surat Pengusul tanggal 28 Maret 2024 No: B/142/LG.01.01/03/2024
	(RUU tentang Kabupaten Donggala, RUU tentang Kabupaten Tolitoli, RUU tentang Kabupaten Poso, RUU tentang Kabupaten Sinjai, RUU tentang Kabupaten Sinjai, RUU tentang Kabupaten Bulukumba, RUU tentang Kabupaten Bone, RUU tentang Kabupaten Jeneponto, RUU tentang Kabupaten Takalar, RUU tentang Kabupaten Gowa, RUU tentang Kota Makassar, RUU tentang Kabupaten Maros, RUU tentang Kabupaten Pangkajene, RUU tentang Kabupaten Barru, RUU tentang Kabupaten Soppeng, RUU tentang Kota Pare-Pare, RUU tentang Kabupaten Kepulauan Selayar, RUU tentang Kabupaten Bantaeng, RUU tentang Kabupaten Bantaeng, RUU tentang Kabupaten Sindenreng, RUU tentang Kabupaten Sindenreng, RUU tentang Kabupaten Pinrang, RUU tentang Kabupaten Enrekang, RUU tentang Kabupaten Luwu, RUU tentang Kabupaten Luwu, RUU tentang Kabupaten Manuju, RUU tentang Kabupaten Mamuju, RUU tentang Kabupaten Polewali Mandar		
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.	KOMISI X	 Menunggu Surpres Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna tgl 9 Juli 2024 Selesai Harmonisasi di Badan Legislasi Tgl 8 Juli 2024 Surat Pengusul tanggal 3 April 2024, No: B/3737/LG.01/04/2024
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2006	DPR (BADAN	 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna tgl 11 Juli 2024 Selesai Penyusunan di Badan Legislasi tgl 9 Juli 2024

Per 11 Juli 2024

NO.	JUDUL	RANCANO UNDA	GAN UNDANG- NG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	tentang Presiden	Dewan	Pertimbangan	LEGISLASI)	

III. RUU DALAM TAHAP HARMONISASI DI BADAN LEGISLASI DPR RI [4 RUU TERDIRI DARI 2 RUU USUL AKD, 2 RUU USUL ANGGOTA]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/ ANGGOTA	Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR Selesai Harmonisasi Tgl 4 September 2020 Surat Pengusul (12 Anggota FP Nasdem) No. F.NasDem.054/DPR-RI/II/2020 tgl 6 Februari 2020 permintaan utk diharmonisasi
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Utara	DPR/ ANGGOTA	Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR Selesai Harmonisasi Tgl 3 Oktober 2022 Surat Pengusul (Yan Permenas Mandenas F-Gerindra, permintaan Harmonisasi Nomor 669/I/A-136/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 (Kumulatif Terbuka)
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	KOMISI VII	RUU Kumulatif Terbuka • Menunggu Paripurna Persetujuan menjadi RUU Usul DPR • RUU sudah dikembalikan ke Pengusul • Selesai Proses Harmonisasi di Badan Legislasi tgl 6 September 2023 • Surat Pengusul permintaan harmonisasi, (Komisi VII DPR RI) Nomor: B/4940/LG.01/2023 tanggal 12 April 2023
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	KOMISI I	Proses Harmonisasi di Badan Legislasi Surat Pengusul tanggal 2 Oktober 2023

IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI [17 RUU TERDIRI DARI 9 RUU USUL BALEG, 4 RUU USUL KOMISI, 2 RUU USUL ANGGOTA, 1 RUU USUL DPR/PEMERINTAH, 1 RUU USUL DPR/DPD]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.	DPR/ KOMISI II	Proses penyusunan di Komisi II
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/ KOMISI III	Proses penyusunan di Komisi III
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	DPR/ KOMISI VI	Proses penyusunan di Komisi VI
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR/ KOMISI VIII	Proses penyusunan di Komisi VIII
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
9.	RUU tentang Pertekstilan.	DPR/ BADAN	Proses penyusunan di Badan Legislasi

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
		LEGISLASI	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR/ ANGGOTA	Proses penyusunan di Anggota
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.	DPR/ ANGGOTA	Proses penyusunan di Anggota
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses penyusunan di Badan Legislasi
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR/ PEMERINTAH	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	DPR/ DPD	

V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH (4 RUU)

NO.		CANGAN UNDANG- NDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA		KETERANO	AN	I
1.	Rancangan	Undang-Undang	PEMERINTAH	Proses	Penyusunan	di	internal

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik		Pemerintah
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai.	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah

VI. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.			
2.			

VII. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU (60 RUU TERDIRI DARI 4 (TIGA) RUU USUL DPR; 2 (DUA) RUU USUL PEMERINTAH; 54 RUU KUMULATIF TERBUKA)

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN	
1.	RUU tentang Perubahan atas	DPR/	Disetujui menjadi UU pada Paripurna tgl 3 Oktober 2023	
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	ANGGOTA	Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 ditetapkan dalam Rapur tanggal 3 Oktober 2023	
2.	Rancangan Undang-Undang	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU pada Paripurna tgl 3 Oktober 2023	
	tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara		Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 ditetapkan dalam Rapur tanggal 3 Oktober 2023	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 5 Desember 2023	
	Perubahan atas Undang-Undang		Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 ditetapkan dalam Rapur tanggal 3	
	Nomor 11 Tahun 2008 tentang			
	Informasi dan Transaksi Elektronik.		Oktober 2023	

	Per 11 Juli 2024		
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun	DPR/ BADAN LEGISLASI	RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 28 Maret 2024
	2014 tentang Desa		
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus	DPR	Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 28 Maret 2024
	Jakarta (Dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU atas Perubahan atas Undang-Undang	(BADAN LEGISLASI)	
	Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik		
	Indonesia).		
6.	Rancangan Undang-Undang	DPR/	Disetujui menjadi UU pada Paripurna
	tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	ANGGOTA	Tgl 4 Juni 2024
	Judul RUU Menjadi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama		
7.	Kehidupan	17014101 11	RUU Kumulatif Terbuka
7.	27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	KOMISI II	Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 4 Juni 2024
	(RUU tentang Kota Banda Aceh, RUU tentang Kabupaten Aceh Besar, RUU tentang Kabupaten Pidie, RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah, RUU tentang Kabupaten Aceh Timur, RUU tentang Kabupaten Aceh Utara, RUU tentang Kabupaten Aceh Barat, RUU tentang Kabupaten Aceh Barat, RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan, RUU tentang Kabupaten Langkat, RUU tentang Kabupaten Langkat, RUU tentang Kabupaten Karo, RUU tentang Kota Medan, RUU tentang Tebing Tinggi, RUU tentang Kabupaten Deli Serdang, RUU tentang Kabupaten Deli Serdang, RUU tentang Kabupaten Asahan, RUU tentang Kabupaten Asahan, RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu, RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara, RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara, RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan, RUU tentang Kota Pematang Siantar, RUU tentang Kabupaten Simalungun, RUU tentang Kota Sibolga, RUU tentang Kabupaten Nias, RUU tentang Kota Pangkalpinang, RUU tentang		

Per 11 Juli 2024

	Per 11 Juli 2024		
	Kabupaten Bangka, RUU tentang Kabupaten Belitung)		
9.	Kabupaten Bangka, RUU tentang Kabupaten Belitung) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota (Term II) di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Riau. (RUU tentang Kota Payakumbuh, RUU tentang Kota Sawahlunto, RUU tentang Kota Solok, RUU Tentang Kota Bukittinggi, RUU tentang Kota Padang Panjang, RUU tentang Kabupaten Sijunjung, RUU tentang Kabupaten Sijunjung, RUU tentang Kabupaten Tanah Datar, dan RUU tentang Kabupaten Bintan, RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan, RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah, RUU tentang Kabupaten Lampung Utara, RUU tentang Kabupaten Batang	DPR/ KOMISI IV	Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 9 Juli 2024 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 9 Juli 2024
	Hari, RUU tentang Kabupaten Kerinci, RUU tentang Kabupaten Merangin, RUU tentang		
	Kota Jambi, RUU tentang Kabupaten Bengkalis, RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu, RUU tentang Kabupaten Kampar, RUU tentang Kota Pekanbaru, RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota, RUU tentang Kabupaten Agam, RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman, RUU tentang Kabupaten Pasaman, dan RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan)		

VIII. RUU YANG DISETUJUI UNTUK DITARIK DARI PEMBAHASAN

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.	DPD	Rapat Paripurna Tgl 4 Juni 2024, Setuju RUU ditarik (Penarikan RUU dari Pembahasan)

Jakarta, 11 Juli 2024 Set. Badan Legislasi DPR RI